

ABSTRAK

Sepanjang tahun 2015-2017 perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung terus mengalami peningkatan. Sementara angka perkawinan bersifat *fluktuatif* atau naik turun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat asas mempersulit perceraian seolah-olah tidak mampu menekan angka perceraian ke titik yang lebih rendah. Perceraian harusnya sebagai pintu darurat, dibolehkan namun bukan sebagai tujuan. Namun trendnya, orang yang bercerai ke Pengadilan Agama Bandung malah semakin banyak dan bertambah setiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung; mengetahui proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung; mengetahui alasan-alasan dari perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat asas mempersulit perceraian. Penelitian ini menggunakan kajian asas hukum. Asas hukum merupakan unsur yang penting dan merupakan pokok dari peraturan hukum. Pendekatan asas hukum tersebut dihubungkan dalam proses pemeriksaan perkara perceraian.

Peneliti menggunakan desain penelitian dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*. Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Seperti: studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara.

Hasil penelitian ini bahwa faktor penyebab meningkatnya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung sepanjang tahun 2015-2017 meliputi beberapa faktor yaitu: *pertama*, Kurangnya kesadaran hukum; *kedua*, aspek legalitas; *ketiga*, krisis moral (perselingkuhan dan KDRT); *keempat*, buruknya kondisi ekonomi keluarga; dan *kelima*, kurangnya tanggung jawab pasangan dalam perkawinan. Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Bandung masih ada yang belum sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama dalam hal memaksimalkan pemanggilan pihak tergugat yang tidak hadir dalam sidang pertama. Pasal 127 HIR mengatur bahwa, jika seorang tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh oranglain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Artinya, pasal tersebut menganjurkan supaya pihak tergugat dipanggil dua kali berturut-turut, namun pada faktanya ada perkara yang diputus verstek hanya dengan menempuh satu kali sidang. Alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama Bandung sepanjang tahun 2015-2017 yaitu: Pertengkaran terus-menerus, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, KDRT, dan judi.